

Analisis Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Terpusat di Korea Utara : Dampaknya Inovasi dan Efisiensi Produksi

Permata Pingkan Mulia^{*1}, Laelatul Qodriyah², Rengganis Carissa Edgina³, Cut Misni Mulasiwi⁴

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Corresponding Author: laelatulq715@gmail.com

Abstrak: Sistem ekonomi terpusat merupakan model di mana negara memiliki kontrol dominan terhadap seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perencanaan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Korea Utara menjadi contoh ekstrem dari penerapan sistem ini, dengan negara berperan sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan mekanisme ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran negara dalam sistem ekonomi terpusat di Korea Utara mempengaruhi tingkat inovasi dan efisiensi produksi dalam konteks sistem ekonomi suatu negara. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kritis, yang bertumpu pada analisis data sekunder dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional guna mengevaluasi peran negara dalam sistem ekonomi terpusat Korea Utara serta dampaknya terhadap inovasi dan efisiensi produksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi negara dalam proses ekonomi menghambat dinamika pasar, membatasi insentif bagi inovasi, dan menyebabkan stagnasi teknologi. Selain itu, efisiensi produksi menjadi rendah akibat birokrasi yang kaku, tidak adanya kompetisi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem produksi. Meskipun sistem ini mampu menjaga stabilitas internal dan ketahanan negara, kelemahannya terletak pada ketidakmampuannya beradaptasi dengan perubahan global dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sehingga, sistem ekonomi terpusat yang sangat dikendalikan oleh negara, seperti di Korea Utara, cenderung menghambat pengembangan inovasi dan efisiensi produksi, yang esensial bagi kemajuan ekonomi modern.

Kata Kunci: Korea Utara, sistem ekonomi terpusat, peran negara, inovasi, efisiensi produksi.

Analysis of the role of the state in the centralized economic system in North Korea: Impact on Innovation and Production Efficiency

Abstract: A centrally planned economy is a model in which the state holds dominant control over all economic activities, including planning, production, distribution, and consumption. North Korea serves as an extreme example of this system, with the state acting as the primary agent in determining the direction and mechanisms of the national economy. This study aims to analyze how the role of the state in North Korea's centrally planned economic system affects the level of innovation and production efficiency within the broader context of national economic systems. The method used is a literature study with a descriptive-critical approach, based on secondary data analysis from academic books, scholarly journals, and reports from international institutions to evaluate the state's role and its impact on innovation and efficiency. The findings show that state dominance in economic processes restricts market dynamics, limits incentives for innovation, and leads to technological stagnation. Furthermore, production efficiency is undermined by rigid bureaucracy, lack of competition, and insufficient transparency and accountability. Although the system provides internal stability and national resilience, its weakness lies in its inability to adapt to global changes and drive long-term growth. Thus, a highly centralized economic system such as that in North Korea tends to hinder the development of innovation and production efficiency—both of which are essential for modern economic advancement.

Keywords: North Korea, centrally planned economy, role of the state, innovation, production efficiency.

How to Cite: Mulia, P. P., & et al (2025). Analisis Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Terpusat di Korea Utara : Dampaknya Inovasi dan Efisiensi Produksi *Jurnal JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 27(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927>

PENDAHULUAN

Sistem perekonomian merupakan metode atau proses yang diterapkan oleh sebuah negara untuk mengelola aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan penggunaan barang serta jasa. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, tergantung pada ideologinya, sejarahnya, budayanya, sumber daya yang dimiliki serta kondisi sosial dan politiknya. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Korea Utara adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat dimana pemerintah memiliki kendali penuh dan berperan penting atas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi terpusat ini masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memproduksi barang, menentukan harga jual, atau melakukan ekonomi lainnya seperti, membeli bahan produksi dan menjual hasil produksi dengan inovasi masyarakat itu sendiri. Perekonomian Korea Utara ini juga di kenal dengan julukan “soialisme juche” yang dikembangkan oleh Kim Il-sung. Salah satu instrument kendali terpenting dalam sistem perekonomian korea utara adalah perencanaan terpusat yang dimana pemerintah memegang kendali penuh atas semua aspek kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi barang dan jasa, memantau dan mengendalikan harga barang dan jasa dan alokasi sumber daya melalui badan perencaan perekonomian dengan pemerintah mengatur perizinan berbagai jenis kegiatan ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah. Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu model ekonomi di mana negara memiliki kontrol dominan terhadap seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perencanaan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam sistem ini, negara berperan sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan mekanisme ekonomi nasional, menggantikan peran mekanisme pasar yang bebas. Sistem ini lahir dari pemikiran ekonomi sosialis yang mengedepankan kesetaraan, pemerataan sumber daya, dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi (Gregory & Stuart, 2013). Salah satu inspirasi utamanya berasal dari pemikiran Karl Marx yang mendorong kontrol negara untuk menghindari eksploitasi oleh kelas kapitalis. Selain itu, teori Keynesianisme juga memberikan justifikasi terhadap intervensi negara dalam mengatasi kegagalan pasar (Keynes, 1936). Dalam konteks global saat ini yang ditandai oleh keterbukaan ekonomi dan kompetisi teknologi, sistem ekonomi terpusat menimbulkan perdebatan baru. Di satu sisi, sistem ini dianggap mampu menciptakan stabilitas politik dan ketahanan terhadap guncangan eksternal, seperti embargo atau krisis pasar. Namun, di sisi lain, pendekatan ini sering kali dikritik karena menyebabkan inefisiensi struktural, stagnasi inovasi, serta rendahnya produktivitas (Kornai, 1992). Studi mengenai sistem ini menjadi sangat relevan, terutama dalam memahami dinamika antara kontrol negara dan perkembangan ekonomi, serta bagaimana sistem tersebut beradaptasi atau gagal dalam era globalisasi dan transformasi digital. Korea Utara dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena merupakan contoh ekstrem dari penerapan sistem ekonomi terpusat di era modern. Negara ini secara konsisten mempertahankan struktur ekonomi komando sejak tahun 1945, dengan penekanan pada ideologi Juche yang menekankan kemandirian dan otarkisme. Meskipun awalnya mengalami pertumbuhan melalui industrialisasi berat, Korea Utara kemudian menghadapi berbagai hambatan ekonomi serius, seperti kelangkaan barang pokok, stagnasi teknologi, dan isolasi internasional. Situasi ini menjadikannya objek kajian yang ideal untuk mengevaluasi efektivitas dan konsekuensi jangka panjang dari sistem ekonomi terpusat dalam konteks dunia yang terus berubah (Armstrong, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana peran negara dalam sistem ekonomi terpusat di Korea Utara, serta dampaknya terhadap inovasi dan efisiensi produksi nasional?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dominan negara dalam sistem ekonomi Korea Utara, menganalisis dampaknya terhadap kemampuan inovatif dan efisiensi produksi, serta memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi negara lain yang menerapkan atau mempertimbangkan model serupa. Mengingat pentingnya inovasi dan efisiensi sebagai indikator daya saing dan pembangunan jangka panjang, kajian ini menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memahami kondisi Korea Utara, tetapi juga untuk menarik pelajaran kebijakan bagi negara-negara dengan kecenderungan sistem ekonomi terpusat lainnya.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis peran negara dalam sistem ekonomi terpusat di Korea Utara serta dampaknya terhadap inovasi dan efisiensi produksi. Studi literatur merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi pemerintah atau organisasi multilateral. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang

berasal dari literatur ekonomi klasik dan kontemporer, laporan dari organisasi seperti UNDP, Bank of Korea, World Food Programme (WFP), serta publikasi ilmiah seperti karya Armstrong (2013), Kornai (1992), dan Gregory & Stuart (2013). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar sistem ekonomi terpusat, menelusuri historis ekonomi Korea Utara, serta membandingkannya dengan sistem ekonomi lain. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kritis, dengan memetakan keterkaitan antara teori ekonomi (seperti sosialisme klasik, Keynesianisme) dan realitas empiris di lapangan. Studi literatur ini juga memungkinkan penulis untuk menilai konsistensi antara kebijakan negara Korea Utara dengan hasil ekonomi yang dicapai, termasuk kendala dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan. Dengan metode ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan memusatkan perhatian pada analisis isi (content analysis) dari dokumen-dokumen relevan. Oleh karena itu, validitas dan kekayaan informasi sangat bergantung pada kualitas serta kredibilitas sumber yang digunakan. Strategi ini dianggap tepat mengingat keterbatasan akses langsung ke dalam sistem tertutup seperti Korea Utara, sehingga pemahaman dapat diperoleh secara mendalam melalui interpretasi sumber literatur yang tersedia dan diakui secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu model ekonomi dimana pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi nasional. Seluruh keputusan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta alokasi sumber daya ditentukan oleh negara melalui mekanisme perencanaan terpusat. Dalam sistem ini, kepemilikan atas alat produksi berada di tangan negara, dan tidak terdapat ruang bagi mekanisme pasar untuk bekerja secara bebas. Gregory dan Stuart (2013) menyatakan bahwa, “Sistem ekonomi terpusat ditandai oleh pengambilan keputusan secara terpusat, dimana seluruh keputusan ekonomi utama ditentukan oleh pemerintah”. Karakteristik utama sistem ini mencakup perencanaan ekonomi jangka panjang (seperti rencana lima tahun), penghapusan kepemilikan pribadi atas aset produktif, serta pembatasan terhadap kebebasan pasar. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi terpusat menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Dalam sistem pasar bebas, keputusan ekonomi didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran, serta inisiatif individu dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Sebaliknya, sistem terpusat menolak mekanisme pasar karena dianggap menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Adapun sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu mengizinkan aktivitas pasar tetapi tetap melibatkan negara dalam pengawasan dan pengaturan. Samuelson dan Nordhaus (2010) menjelaskan bahwa, “Sebagian besar ekonomi modern merupakan ekonomi campuran yang mengkombinasikan kebebasan pasar dengan regulasi dan pengendalian oleh pemerintah” (hlm. 37). Oleh karena itu, sistem ekonomi campuran dianggap lebih fleksibel dan realistis dalam konteks ekonomi kontemporer. Teori-teori ekonomi tertentu memberikan justifikasi terhadap peran aktif negara dalam ekonomi, yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi terpusat. Salah satunya adalah teori Keynesianisme yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, khususnya pada saat terjadi krisis ekonomi, melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus berperan dalam mengelola permintaan agregat untuk menghindari pengangguran dan resesi. Selain itu, teori sosialisme klasik yang dicetuskan oleh Karl Marx juga mendukung penguasaan negara atas alat produksi guna menghindari eksploitasi kelas pekerja dan menciptakan keadilan distribusi. Namun demikian, sistem ekonomi terpusat tidak lepas dari berbagai kritik dan tantangan. Dalam praktiknya, sistem ini sering kali menimbulkan inefisiensi, stagnasi inovasi, birokrasi yang berlebihan, serta kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok akibat perencanaan yang tidak fleksibel. Kornai (1992), dalam analisisnya mengenai sistem ekonomi sosialis, mengemukakan bahwa “Kelangkaan bukan merupakan ciri insidental, melainkan karakteristik yang melekat dan permanen dari sistem ekonomi terpusat” (*The Socialist System: The Political Economy of Communism*, hlm. 233). Contoh nyata dapat ditemukan pada pengalaman negara-negara seperti Uni Soviet dan Korea Utara, di mana sistem ini justru menimbulkan distorsi dalam produksi dan distribusi barang. Setelah pembagian Semenanjung Korea pada tahun 1945, Korea Utara membangun sistem ekonomi berdasarkan model sosialis yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Negara ini secara resmi mengadopsi sistem ekonomi terpusat dengan kontrol penuh negara terhadap produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada awalnya, Korea Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik melalui industrialisasi berat dan redistribusi lahan. Namun, mulai 1970-an, pertumbuhan ekonomi melambat akibat keterbatasan sumber

daya, isolasi internasional, dan inefisiensi struktural. Pada 1990-an, krisis ekonomi besar terjadi akibat jatuhnya Uni Soviet, yang menyebabkan berkurangnya bantuan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Krisis ini diperparah oleh bencana kelaparan yang dikenal sebagai *Arduous March*. Sejak itu, meskipun beberapa reformasi informal mulai muncul (seperti pasar gelap atau *jangmadang*), negara tetap mempertahankan struktur ekonomi terpusat. Perencanaan ekonomi di Korea Utara dilakukan melalui sistem *rencana lima tahun* (mirip dengan Uni Soviet). Negara menetapkan target produksi untuk setiap sektor: industri berat, pertanian, energi, dan militer. Perencanaan ini dilakukan secara top-down oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat dan Partai Buruh Korea. Semua sarana produksi dimiliki oleh negara. Negara menentukan kuota produksi dan mengelola perusahaan-perusahaan negara (*state-owned enterprises*). Tidak ada hak kepemilikan pribadi atas tanah atau alat produksi. Pekerja mendapatkan pekerjaan berdasarkan alokasi negara, dan produktivitas mereka dinilai berdasarkan pemenuhan kuota negara. Distribusi barang pokok dilakukan melalui sistem distribusi publik yang disebut Public Distribution System (PDS). Makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok disalurkan oleh negara berdasarkan sistem kupon. Namun, setelah tahun 1990-an, sistem ini mulai rusak dan tidak mencukupi, menyebabkan pertumbuhan pasar informal (*jangmadang*). Negara mengatur pola konsumsi masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa secara terbatas. Kebebasan konsumen sangat terbatas; pilihan ditentukan oleh ketersediaan barang dalam sistem distribusi negara, bukan oleh permintaan pasar. Struktur birokrasi ekonomi di Korea Utara sangat terpusat dan hierarkis. Berikut ini aktor-aktor utama dalam sistem birokrasi ekonomi seperti Komite Perencanaan Negara (State Planning Commission) yang bertugas menyusun rencana ekonomi nasional lima tahunan dan tahunan. Komite ini menjadi pusat dari seluruh proses perencanaan, Kabinet Korea Utara yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Partai. Kementerian-kementerian di bawah kabinet mengimplementasikan kebijakan di sektor masing-masing, seperti industri, pertanian, dan perdagangan terdapat juga Partai Buruh Korea (Workers' Party of Korea/WPK) sebagai aktor tertinggi dalam pengambilan keputusan, WPK memiliki otoritas absolut terhadap semua keputusan ekonomi. Sekretariat Partai dan Komite Sentral mengarahkan semua kebijakan, termasuk ekonomi. Pemimpin tertinggi, saat ini Kim Jong Un, memegang kendali atas semua institusi melalui struktur partai ini dan Organisasi Massa dan Militer yaitu Organisasi seperti *Union of Agricultural Workers*, *Women's Union*, dan Tentara Rakyat Korea (KPA) juga berperan dalam pelaksanaan ekonomi. Militer bahkan memiliki unit-unit bisnis tersendiri yang mengelola sumber daya. Sistem ekonomi Korea Utara didasarkan pada model ekonomi terpusat (command economy), di mana negara memiliki kendali penuh atas proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Dalam kerangka ini, negara menetapkan secara rinci rencana ekonomi jangka panjang yang meliputi target produksi, jenis produk yang akan dibuat, serta alokasi sumber daya. Model ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan ekonomi, sementara inisiatif individu dan korporasi nyaris tidak memiliki ruang gerak. Sistem ini mencerminkan ideologi Juche (kemandirian), yang menekankan otarkisme dan anti-imperialisme sebagai dasar pembangunan ekonomi. Namun, pendekatan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap kemampuan negara dalam menciptakan inovasi dan teknologi baru. Salah satu hambatan utama dalam sistem ini adalah keterbatasan insentif bagi individu atau korporasi untuk berinovasi. Dalam ekonomi pasar, insentif seperti laba, pengakuan, dan persaingan menjadi pendorong utama inovasi. Sebaliknya, di Korea Utara, aktivitas ekonomi dikontrol dan ditentukan oleh negara, sehingga tidak ada ruang untuk kreativitas bebas atau motivasi ekonomi pribadi. Para ilmuwan dan teknokrat bekerja bukan atas dasar kebebasan riset, melainkan berdasarkan instruksi negara, dan hasilnya lebih diarahkan untuk memenuhi target politik atau militer. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pengembangan produk maupun efisiensi produksi. Selain itu, terdapat hambatan struktural yang signifikan terhadap riset dan pengembangan teknologi (R&D). Korea Utara memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur riset, akses terhadap informasi global, dan kolaborasi internasional. Embargo internasional yang dikenakan terhadap negara tersebut, terutama terkait program nuklirnya, semakin memperburuk akses terhadap teknologi baru. Sistem pendidikan dan riset di Korea Utara pun sangat terpusat dan diarahkan pada kepentingan negara, bukan pada penciptaan ekosistem inovatif. Banyak institusi riset yang tidak memiliki kemandirian atau konektivitas dengan dunia luar, sehingga mereka terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan global. Beberapa studi kasus menunjukkan rendahnya tingkat inovasi di Korea Utara.

Menurut laporan dari Institute for Science and International Security (2020), meskipun Korea Utara memiliki program nuklir dan rudal yang maju, kemajuan ini terjadi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas dan tertutup, dengan alokasi sumber daya besar yang tidak seimbang terhadap sektor sipil lainnya. Laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) juga menunjukkan bahwa Korea Utara hampir tidak memiliki kontribusi dalam pengajuan paten internasional dalam dua dekade terakhir. Sebagai

perbandingan, negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok—yang dulunya juga memiliki ekonomi terpusat—berhasil meningkatkan kapasitas inovatif mereka ketika mereka mulai membuka pasar, memberi ruang pada swasta, dan memberikan insentif terhadap riset. Perbandingan dengan Korea Selatan memberikan kontras yang sangat mencolok. Korea Selatan, yang menganut sistem ekonomi pasar dan inovasi sejak 1960-an, telah menjadi salah satu negara dengan tingkat inovasi tertinggi di dunia. Berdasarkan Bloomberg Innovation Index 2023, Korea Selatan berada di peringkat atas secara global berkat investasinya dalam R&D, produktivitas manufaktur tinggi, dan sektor swasta yang kuat. Hal ini tidak lepas dari kombinasi antara dukungan pemerintah dan dinamika pasar yang kompetitif. Sementara itu, Korea Utara masih berkuat dengan pendekatan top-down yang menghambat partisipasi luas dan pertumbuhan teknologi sipil. Sistem ekonomi terpusat yang dianut Korea Utara memiliki dampak serius terhadap efisiensi produksi nasional. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada mekanisme perintah dari pusat—seringkali dalam bentuk rencana lima tahunan—yang menetapkan secara rinci target produksi, alokasi input, dan distribusi output di semua sektor ekonomi. Ketergantungan pada mekanisme perintah ini menciptakan ketidakfleksibelan dan membuat koordinasi antar sektor menjadi lemah. Sebagai contoh, keterlambatan dalam distribusi input dari sektor pertanian ke sektor industri pupuk, atau dari sektor energi ke sektor manufaktur, dapat menyebabkan penurunan produktivitas secara keseluruhan. Sistem yang kaku ini juga tidak mampu merespons dinamika permintaan dan penawaran dengan cepat karena perubahan membutuhkan keputusan dari otoritas pusat yang lambat dan birokratis. Masalah birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas turut memperparah rendahnya efisiensi produksi di Korea Utara. Proses pengambilan keputusan ekonomi dilakukan secara hierarkis dan tertutup, dengan sedikit atau tanpa partisipasi dari pelaksana di lapangan. Dalam banyak kasus, data ekonomi yang disampaikan ke pusat dipalsukan atau dilebih-lebihkan karena tekanan untuk memenuhi target yang ditentukan, meskipun target tersebut tidak realistis. Hal ini menciptakan ilusi pencapaian dan mengaburkan kenyataan di lapangan. Kurangnya transparansi juga menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi kegagalan produksi atau kesalahan dalam alokasi sumber daya. Laporan dari *United Nations Panel of Experts (2022)* menunjukkan bahwa banyak proyek pembangunan infrastruktur atau pertanian di Korea Utara tidak mencapai tujuan yang direncanakan karena korupsi, lemahnya supervisi, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Kurangnya kompetisi dalam sistem ekonomi terpusat Korea Utara menjadi faktor lain yang menghambat efisiensi produksi. Dalam ekonomi pasar, persaingan antar perusahaan atau sektor menjadi pendorong bagi inovasi dan efisiensi, karena tiap entitas berusaha menawarkan produk atau jasa dengan kualitas terbaik dan biaya terendah. Sebaliknya, di Korea Utara, karena semua entitas produksi berada di bawah kendali negara dan tidak ada mekanisme kompetisi, tidak ada insentif untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya, stagnasi teknologi, dan rendahnya kualitas output produksi. Dalam sektor industri berat misalnya, mesin-mesin dan peralatan yang digunakan umumnya berusia tua dan jarang diperbarui karena tidak adanya tekanan pasar untuk melakukan modernisasi. Data dari *World Bank* dan *United Nations Development Programme (UNDP)* secara tidak langsung mencerminkan masalah efisiensi ini. Meski data ekonomi resmi Korea Utara terbatas dan sangat dijaga, laporan dari *UNDP Regional Human Development Report (2020)* menyebutkan bahwa Korea Utara memiliki salah satu tingkat produktivitas tenaga kerja terendah di Asia Timur. Selain itu, laporan dari *The Bank of Korea (2022)*, yang secara rutin memperkirakan PDB Korea Utara karena ketiadaan data resmi, menunjukkan bahwa sektor industri dan pertanian negara tersebut terus mengalami kontraksi atau pertumbuhan stagnan selama dekade terakhir, menandakan inefisiensi struktural yang mendalam. Dari perspektif Korea Utara, sistem ekonomi terpusat dipandang memiliki sejumlah keuntungan strategis yang mendukung keberlangsungan rezim dan kelangsungan negara dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Salah satu keuntungan utamanya adalah stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka pendek. Dalam sistem ini, negara mengontrol seluruh aktivitas ekonomi melalui perencanaan yang tersentralisasi, memungkinkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, menghindari fluktuasi pasar, serta mengatur pasokan barang dan jasa sesuai dengan prioritas nasional. Bagi Korea Utara, stabilitas ini penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan dan menghindari gejolak sosial. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi negara, seperti pertahanan dan ketahanan pangan, tanpa harus mempertimbangkan tekanan pasar atau kepentingan investor swasta. Hal ini menjadi penting, terutama dalam situasi krisis atau bencana, ketika negara dapat dengan cepat memobilisasi dan mengatur sumber daya yang tersedia. Selain itu, sistem ekonomi terpusat memberikan ketahanan relatif terhadap embargo dan sanksi internasional. Korea Utara telah lama hidup di bawah berbagai sanksi internasional akibat program nuklir dan pelanggaran HAM, namun negara ini tetap mampu bertahan dalam isolasi relatif. Karena tidak tergantung pada sistem perdagangan internasional secara langsung, Korea Utara meminimalkan keterpaparan terhadap dinamika

global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah juga dapat mengontrol penggunaan mata uang asing, membatasi impor barang-barang mewah, serta mengarahkan jalur perdagangan melalui negara-negara mitra strategis seperti Tiongkok. Menurut laporan dari *UN Panel of Experts* (2021), meskipun terjadi penurunan drastis dalam aktivitas perdagangan, terutama selama pandemi COVID-19, sistem distribusi negara tetap berjalan, berkat adanya cadangan strategis dan kontrol penuh atas logistik dan pangan. Ketahanan ini ditopang oleh ketidaktergantungan pada sektor swasta dan jaringan internasional, meski dengan konsekuensi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Keuntungan lainnya adalah kemampuan negara untuk mengendalikan distribusi sumber daya strategis secara penuh. Dalam sistem ini, negara memegang otoritas absolut atas sumber daya seperti pangan, energi, dan bahan baku industri. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas distribusi, misalnya mendahulukan sektor militer, pembangunan infrastruktur strategis, atau cadangan nasional saat krisis. Dalam kasus Korea Utara, misalnya, sumber daya seperti batu bara, baja, dan hasil pertanian dikelola secara sentral oleh negara, dan distribusinya dikendalikan melalui sistem kupon dan alokasi administratif. Ini memberi negara kapasitas besar untuk menjamin keamanan nasional dan mendukung kemandirian ekonomi sesuai prinsip *Juche* (ideologi kemandirian). Menurut Armstrong (2013) dalam *Tyranny of the Weak*, model seperti ini mendukung narasi ideologis yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi rakyat dan menjustifikasi tindakan pengendalian ekonomi yang ketat sebagai bentuk perlindungan dari intervensi asing. Sistem ekonomi terpusat yang diterapkan di Korea Utara menghadapi sejumlah keterbatasan dan tantangan struktural yang signifikan, terutama dalam konteks perubahan global yang cepat. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakmampuan sistem ini untuk beradaptasi dengan dinamika global. Di era globalisasi, negara-negara semakin saling bergantung melalui perdagangan, teknologi, dan pertukaran informasi. Namun, Korea Utara memilih untuk tetap menutup diri dan mengandalkan prinsip kemandirian (*Juche*), yang mengorbankan peluang untuk mengadopsi teknologi baru, menarik investasi asing, atau memperluas pasar ekspor. Penolakan terhadap mekanisme pasar bebas dan dominasi negara dalam setiap keputusan ekonomi membuat negara ini sulit menyesuaikan diri dengan krisis global seperti pandemi COVID-19 atau fluktuasi harga komoditas. Hal ini diperparah oleh sanksi internasional yang membatasi akses terhadap sistem keuangan dan perdagangan internasional, menjadikan ekonomi Korea Utara semakin terisolasi. Dampaknya terasa dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan rakyat yang stagnan atau bahkan menurun. Karena alokasi sumber daya dilakukan secara sentral dan seringkali tidak berdasarkan efisiensi atau kebutuhan nyata masyarakat, berbagai sektor penting seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan mengalami kekurangan dana dan inovasi.

Menurut *UNDP Human Development Report* (2020), indikator-indikator seperti harapan hidup, akses terhadap gizi yang layak, dan pendidikan dasar di Korea Utara tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Selain itu, laporan dari *The Bank of Korea* (2022) memperkirakan bahwa PDB Korea Utara secara riil terus mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat dampak pandemi dan pembatasan perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang tidak fleksibel berkontribusi pada stagnasi ekonomi yang kronis dan sulit berkembang dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, sistem ini mengandung risiko stagnasi ekonomi dan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri, terutama dalam hal pangan dan energi. Meskipun negara mengklaim swasembada, kenyataannya Korea Utara masih sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan dari badan-badan seperti *World Food Programme* (*WFP*) dan negara-negara mitra seperti Tiongkok. Ketika terjadi gagal panen atau bencana alam, sistem distribusi pangan negara tidak mampu menanggulangi krisis tanpa dukungan dari luar. Menurut laporan *WFP* (2021), sekitar 40% populasi Korea Utara mengalami kerawanan pangan kronis, dan jutaan orang bergantung pada distribusi bantuan pangan internasional. Ketergantungan ini ironis, mengingat ideologi negara yang menekankan kemandirian absolut, namun dalam praktiknya menunjukkan kerentanan akibat ketidakefisienan sistem terpusat. Berdasarkan analisis mendalam terhadap sistem ekonomi terpusat di Korea Utara, dapat disimpulkan bahwa peran dominan negara dalam mengatur seluruh aspek ekonomi mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi telah menciptakan hambatan struktural terhadap inovasi dan efisiensi produksi. Sistem yang kaku, birokratis, dan tertutup membatasi ruang gerak individu maupun institusi dalam menciptakan perubahan, memperkenalkan teknologi baru, atau meningkatkan produktivitas. Ketiadaan insentif pasar, lemahnya transparansi, serta dominasi pemerintah sentral mengakibatkan inefisiensi ekonomi yang kronis, stagnasi inovatif, dan rendahnya daya saing internasional. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan kesejahteraan rakyat Korea Utara. Implikasi dari temuan ini penting bagi negara-negara lain yang menganut atau mempertimbangkan sistem ekonomi terpusat. Meskipun sistem ini menawarkan kestabilan politik dan kontrol penuh terhadap sumber daya strategis, terutama dalam situasi krisis atau

embargo, manfaat tersebut datang dengan harga yang sangat tinggi dalam hal keterbukaan, inovasi, dan ketahanan jangka panjang. Negara-negara dengan struktur ekonomi serupa harus menyadari bahwa terlalu besar dominasi negara dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat menyebabkan stagnasi dan ketergantungan yang sulit diatasi, terutama ketika dihadapkan pada perubahan global yang cepat dan dinamis. Oleh karena itu, rekomendasi utama bagi negara-negara yang masih menerapkan sistem ekonomi terpusat adalah melakukan reformasi bertahap dengan membuka ruang bagi mekanisme pasar, memperkuat insentif bagi sektor swasta, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas birokrasi. Pembelajaran dari Korea Utara menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya bergantung pada stabilitas internal, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dan partisipasi aktif dalam sistem global. Negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam, yang awalnya menganut sistem ekonomi terpusat, telah menunjukkan bahwa transformasi menuju model hibrida—dengan tetap menjaga peran strategis negara namun memberi ruang pada dinamika pasar—dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada evaluasi kinerja dapat menjadi alternatif yang lebih efektif bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi terpusat di Korea Utara dimana pemerintah atau negara memiliki kontrol penuh atas semua aspek kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada inovasi dan efisiensi produksi. Meskipun sistem ini memberikan stabilitas politik dalam jangka pendek, namun pada jangka panjangnya terjadi dominasi negara yang dimana pemerintah mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga mengakibatkan kurangnya inovasi, efisiensi yang rendah, dan terbatasnya kebebasan ekonomi bagi masyarakat yang menghambat dinamika pasar dan mengurangi insentif untuk berinovasi. Birokrasi yang kaku, kurangnya kompetisi, dan transparansi yang rendah menyebabkan stagnasi teknologi dan rendahnya produktivitas. Selain itu, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global membuat ekonomi Korea Utara rentan dan stagnan. Oleh karena itu, negara-negara lain yang menggunakan sistem ekonomi terpusat harus mempertimbangkan adanya risiko yang telah di alami oleh Korea Utara dengan adanya nilai negative terhadap inovasi dan efisiensi produksi. Dalam hal ini perlu adanya reformasi yang memberi ruang bagi mekanisme pasar dan meningkatkan partisipasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C. K. (2013). *Tyranny of the Weak: North Korea and the World, 1950–1992*. Cornell University Press.
- Bank of Korea. (2022). *Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2021*. <https://www.bok.or.kr>
- Bloomberg Innovation Index. (2023). *Bloomberg Rankings*.
- Frank, Rüdiger. (2005). "Economic Reforms in North Korea (1998–2004): Systemic Restrictions, Quantitative Analysis, Ideological Background." *Journal of the Asia Pacific Economy*, 10(3), 278–311.
- Gregory, P. R., & Stuart, R. C. (2013). *The Global Economy and Its Economic Systems*. South-Western Cengage Learning.
- Haggard, Stephan & Noland, Marcus. (2007). "Famine in North Korea Redux?" *Journal of Asian Economics*, 18(2), 384–395.
- Institute for Science and International Security. (2020). *North Korea's Nuclear and Missile Programs: Technical Progress, Sanctions, and Deterrence*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Kim, S. S. (2011). "North Korea's Science and Technology Policy under Economic Crisis," *Asian Perspective*, Vol. 35, No. 2.
- Kornai, J. (1992). *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Princeton University Press.
- Lankov, A. (2013). *The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia*. Oxford University Press.



- Lee, Suk. (2003). "The DPRK's Economic Policy During the Reform Period (1990–2002)." Bank of Korea Working Paper.
- Madden, Michael. (2014). "North Korea's Leadership Dynamics and Authoritarian Institutions." *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 193–214.
- Noland, M. (2000). *Avoiding the Apocalypse: The Future of the Two Koreas*. Peterson Institute for International Economics.
- Noland, M. (2004). "Famine and Reform in North Korea," Institute for International Economics.
- Noland, M. (2014). "North Korea's Economy: The Path Ahead," Peterson Institute for International Economics.
- Novrianto, A. (2024, 20 Juni). *Mengkaji sistem ekonomi komando Korea Utara*. *Kompasiana*. Diakses 21 Juni, dari <https://www.kompasiana.com/novrialdi2018/6674490234777c25030863c2/mengkaji-sistem-ekonomi-komando-korea-utara>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (Edisi ke-19). McGraw-Hill Education.
- Smith, H. (2015). *North Korea: Markets and Military Rule*. Cambridge University Press.
- UNDP. (2020). *Human Development Report – East Asia Regional Overview*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report – East Asia Regional Overview*.
- United Nations Panel of Experts. (2021). *Final Report Pursuant to Resolution 2515 (2020) on the Democratic People's Republic of Korea*. https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel_experts/reports
- United Nations Panel of Experts. (2022). *Report on the Democratic People's Republic of Korea pursuant to Security Council resolution 2397 (2017)*. UN Security Council Documents.
- World Food Programme (WFP). (2021). *DPR Korea: Needs and Priorities Overview*. <https://www.wfp.org>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). *WIPO Statistics Database*.